

LAPORAN

EVALUASI INTERNAL BENTURAN KEPENTINGAN

Semester I
Tahun 2023



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan **Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2023**.

Laporan ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 13 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memacu penanganan benturan kepentingan ke arah birokrasi yang menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Demikian laporan ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juni 2023
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650117 199010 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan.....	2
 BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN	
KEPENTINGAN	4
A. Sosialisasi	4
B. Identifikasi	4
C. Pencegahan	4
D. Penanganan Benturan Kepentingan.....	5
E. Pelaporan.....	6
 BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN	
KEPENTINGAN	7
A. Sosialisasi	7
B. Identifikasi	7
C. Pencegahan	7
D. Penanganan Benturan Kepentingan.....	7
E. Pelaporan.....	8
 BAB IV PENUTUP	 9
A. Simpulan.....	9
B. Rencana Tindak Lanjut.....	9
 LAMPIRAN	 10
Lampiran 1 : Nota Dinas, Daftar Hadir, dan Notulen Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023	10
Lampiran 2 : Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi memengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seseorang dalam mengemban tugasnya. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif dan efisien karena setiap pegawai mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap pegawai juga harus mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawainya, meskipun dalam pelaksanaanya merupakan hal yang mana sulit dihindari. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu proses bagi pegawai yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini antara lain:

1. Sebagai pedoman bagi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi situasi – situasi benturan kepentingan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengetahui terkait implementasi budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. Menegakkan integritas;
5. Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
6. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Implementasi benturan kepentingan yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

A. Sosialisasi

Sosialisasi dan identifikasi benturan kepentingan pada 16 Juni 2023 dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*, diikuti oleh perwakilan masing-masing bidang, CDK, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (**Lampiran 1**).

B. Identifikasi

Dalam rangka pengisian aplikasi SIBEKEN dan pemetaan potensi benturan kepentingan pada semester I tahun 2023, telah dilakukan identifikasi potensi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Bidang, Cabang Dinas, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. (**Lampiran 2**).

C. Pencegahan

Pencegahan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi potensi benturan kepentingan tertuang dalam form identifikasi potensi benturan kepentingan yang dibuat oleh Bidang, Cabang Dinas, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (**Lampiran 2**).

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Melaksanakan seluruh upaya pencegahan potensi benturan kepentingan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Menerapkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5305/4/2022 tanggal 09 November 2021;
3. Mengefektifkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

E. Pelaporan

Pada semester I tahun 2023 tidak terdapat pelaporan mengenai benturan kepentingan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang ditunjukkan dalam matriks dibawah ini :

**Matriks Jumlah Pelaporan Benturan Kepentingan pada
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Periode Januari – Juni Tahun 2023**

No.	Sekretariat/Bidang/UPT	Jumlah Benturan Kepentingan
1	Sekretariat	0
2	Bidang Perikanan Tangkap	0
3	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	0
4	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	0
5	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0
6	Cabang Dinas Kelautan Wil. Barat	0
7	Cabang Dinas Kelautan Wil. Timur	0
8	Cabang Dinas Kelautan Wil. Selatan	0
9	Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0
10	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	0
11	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	0
12	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	0
13	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	0
14	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	0
15	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	0

16	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	0
17	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	0
18	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	0
19	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending	0
20	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	0
21	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	0
22	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	0
	JUMLAH TOTAL	0

Commented [NN1]: Emang tdk ada sama sekali?

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Evaluasi atas implementasi penanganan benturan kepentingan yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

A. Sosialisasi

Sosialisasi terhadap pegawai telah dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting* yang diwakilkan oleh perwakilan dari masing-masing Bidang, Cabang Dinas dan UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan pada 16 Juni 2023 sebagaimana **lampiran 1**. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan dan pengendalian yang dapat dilakukan sebagai langkah preventif dalam menghadapi benturan kepentingan.

B. Identifikasi

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pemutakhiran pada tanggal 21 Juni 2023 di aplikasi SIBEKEN yang sebelumnya telah melalui proses reviu oleh Inspektorat untuk menyesuaikan substansi yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pasal 7 Ayat (3) (**Lampiran 2**).

C. Pencegahan

Pencegahan perlu disempurnakan dengan pemutakhiran hasil identifikasi sehingga lebih jelas dan lengkap serta akan mempermudah dalam implementasi pencegahan di lapangan sebagaimana **lampiran 2**.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa evaluasi penanganan benturan kepentingan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023, yaitu:

1. Masih ada pegawai yang belum memahami sepenuhnya mengenai

benturan kepentingan, sehingga diperlukan sosialisasi mengenai Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5305/4/2022 tanggal 09 November 2021 perlu agar pegawai memahami alur pelaporan benturan kepentingan dan bentuk-bentuk serta pencegahan menghadapi benturan kepentingan;

2. Personil dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 untuk lebih memberikan pemahaman pada Bidang, UPT atau Cabang Dinas masing-masing mengenai potensi benturan kepentingan dan Langkah-langkah preventif dalam menghadapinya.

E. Pelaporan

Pada Semester I Tahun 2023 tidak ada laporan mengenai benturan kepentingan. Dalam hal ini yang terpenting adalah upaya pencegahan secara regular terus dilakukan, selain itu melakukan monitoring sehingga upaya pencegahan menimbulkan dampak positif dalam lingkungan kerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023, antara lain:

1. Sosialisasi terhadap seluruh pegawai telah dilaksanakan melalui pejabat serta perwakilan masing-masing bidang/UPT/CDK yang mengikuti sosialisasi;
2. Telah dilaksanakan pemutakhiran Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 pada tanggal 16 Juni 2023 pada aplikasi SIBEKEN yang sebelumnya telah melalui proses revidi dari Inspektorat;
3. Pada Semester I Tahun 2023 tidak ada laporan mengenai terjadinya benturan kepentingan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023, antara lain:

1. Sosialisasi mengenai benturan kepentingan dan langkah-langkah preventifnya dilakukan secara berkala terhadap seluruh pegawai;
2. Hasil identifikasi benturan kepentingan perlu lebih diupayakan kegiatan pencegahannya dan memaksimalkan upaya pendokumentasian penanganan secara lebih lengkap dan regular;
3. Tim Benturan Kepentingan lebih aktif dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kerjasama tim dalam penanganan benturan kepentingan.

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469, 3546607
Faksimile 024-3551289 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dkp@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : 1. SEKRETARIS
2. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
3. KEPALA BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN
4. KEPALA BIDANG KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
5. KEPALA BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS
6. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH SELATAN
7. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT
8. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH TIMUR
9. KEPALA BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
10. KEPALA BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
11. KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
12. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG
13. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LOHGENDING
14. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAWANG
15. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA
16. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO
17. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI WONOKERTO
18. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI
19. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LARANGAN
20. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK
21. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TASIKAGUNG
22. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANGLOR

Lewat Yth. : -
Dari : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tembusan :
Tanggal : 13 Juni 2023
Nomor : 525.72/1066
Hal : Identifikasi dan Sosialisasi Benturan Kepentingan

Menindaklanjuti Surat Edaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 510.35/208 tentang Permohonan Penyampaian Laporan Evaluasi Internal Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2023, maka akan menyelenggarakan Sosialisasi Benturan Kepentingan yang akan dilaksanakan **secara daring** pada :

Hari/Tanggal : Jumat/16 Juni 2023
Jam : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Unit kerja masing-masing
Catatan : Sosialisasi secara **daring** melalui *Zoom Meeting*
Link : 539 510 4674
Passcode : DKP134

Terkait acara dimaksud agar melengkapi data identifikasi benturan kepentingan pada link <https://bit.ly/bekendkijateng> paling lambat tanggal **15 Juni 2023**. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Humairoh H Hanifah (081390106004).
Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19650117 199010 1 001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Sosialisasi Benturan Kepentingan Report

Nama	Dr. Jamaludin, Malik, SPi, MSi
Bidang/UPT/CDK	PPP Wonokerto
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 16:54:31

Nama	Luqmanul Khakim, S.Pi, Luqmanul
Bidang/UPT/CDK	UPK
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 16:27:35

Nama	Pujiyanti, Puji
Bidang/UPT/CDK	PPP Klidang lor
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 15:49:03

Nama	Humairoh, Hanifah
Bidang/UPT/CDK	Program
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 15:47:12

Nama	EKA, SEPTIAN ADI
Bidang/UPT/CDK	BIDANG PERIKANAN TANGKAP
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 15:11:12

Nama	Ir. Sri Sumartini, MPi
Bidang/UPT/CDK	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:52:46

Nama	Rohita, Arum
Bidang/UPT/CDK	BLPKIL Kelas A
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:45:46

Nama	SUJIYANTO, SUJI
Bidang/UPT/CDK	TANGKAP
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:41:11

Nama	Dewi, Parikesit
Bidang/UPT/CDK	BLPKIL DKP Prov. Jateng
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:35:19

Nama	Amelia, Indriastuti, ST, M.Si
Bidang/UPT/CDK	BLPKIL Kelas A
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:35:13

Nama	Siwi, Hadi Purnanto
Bidang/UPT/CDK	PPP Bajomulyo
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:30:39

Nama	Dina, Nuraida
Bidang/UPT/CDK	Bidang KP3K
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:28:31

Nama	Bambang, Supriyanto
Bidang/UPT/CDK	BPMHP Kelas A
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:27:55

Nama	ifdlol, syukri
Bidang/UPT/CDK	PPP Tawang
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:24:25

Nama	Ariyanto, Ariyanto
Bidang/UPT/CDK	BBIAPL
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:22:02

Nama	Ariyanto, Ariyanto
Bidang/UPT/CDK	BBIAPL
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:21:37

Nama	Febriari Elis Tri Susanti
Bidang/UPT/CDK	PPP LOGENDING
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:16:32

Nama	dessy, amelia
Bidang/UPT/CDK	CDK Timur
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:15:13

Nama	Hendi, Kristiana
Bidang/UPT/CDK	PPP Tasikagung
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:12:09

Nama	Happy, Widyarini
Bidang/UPT/CDK	CDK Barat
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:12:00

Nama	Imam Faiz, Farkhani
Bidang/UPT/CDK	PPP Bajomulyo
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:08:41

Nama	Aldise Kresna Dewi, Tutianvia
Bidang/UPT/CDK	PPP Morodemak
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:08:29

Nama	RATIH, HANDAYANI
Bidang/UPT/CDK	PPP KLIDANG LOR
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:08:04

Nama	Derisna, Aditya
Bidang/UPT/CDK	BBIAPL Kelas A
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:07:52

Nama	Aprilia Putri
Bidang/UPT/CDK	PPP Klidang Lor
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:07:51

Nama	Yuli, Windayani
Bidang/UPT/CDK	CDK Wilayah Selatan
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:07:37

Nama	PUJIYANI
Bidang/UPT/CDK	PPP KLIDANG LOR
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:07:23

Nama	R. DRIANTO, WIDIYATMOKO
Bidang/UPT/CDK	PPP BAJOMULYO
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:06:28

Nama	SAIFUDDIN
Bidang/UPT/CDK	PPP KARIMUNJAWA
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:05:48

Nama	Fritta, Wijayanti
Bidang/UPT/CDK	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:05:25

Nama	Ary, Setyawan
Bidang/UPT/CDK	Program
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:05:08

Nama	Hermin, Dewi Sulistijani
Bidang/UPT/CDK	BPMHP
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:04:47

Nama	Mulyono, Mulyono
Bidang/UPT/CDK	BPMHP
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:04:00

Nama	Risnanda Patria, Perdana
Bidang/UPT/CDK	PPP LARANGAN
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:02:39

Nama	Slamet Raharjo, SR
Bidang/UPT/CDK	PPP Asemdayong
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 14:00:42

Nama	Amrullah, Sigit
Bidang/UPT/CDK	Ppp larangan
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:58:32

Nama	Slamet Raharjo
Bidang/UPT/CDK	PPP Asemdayong
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:56:41

Nama	Nanang, Nasrul
Bidang/UPT/CDK	Subag Program
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:53:19

Nama	Anton, Kristanto
Bidang/UPT/CDK	PPP Asemdayong
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:51:05

Nama	Joko, Purwanto
Bidang/UPT/CDK	PPP Wonokerto
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:49:26

Nama	MIRANDA RISANG AYU, SWASTIKA
Bidang/UPT/CDK	PPP WONOKERTO PEKALONGAN
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:48:55

Nama	Amalia, Rofiah
Bidang/UPT/CDK	PPP Wonokerto
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:48:09

Nama	Supriyanto, Supriyanto
Bidang/UPT/CDK	PPP wonokerto
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:48:09

Nama	Herfi, Listanti
Bidang/UPT/CDK	BPMHP Kelas A
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:46:56

Nama	Diah, Agustine Wahyono
Bidang/UPT/CDK	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:46:20

Nama	Widie, Prastomo
Bidang/UPT/CDK	Bidang Perikanan Tangkap
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tanda Tangan	
Added Time	16-Jun-2023 13:46:03

Powered by  Zoho Form

NOTULEN SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN 16 JUNI 2023

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan pada masing-masing Bidang, UPT, dan Cabang Dinas. Pada saat sosialisasi diambil beberapa contoh untuk direviu secara langsung.
2. Dilakukan perbaikan pada identifikasi benturan kepentingan berdasarkan hasil reviu oleh Inspektorat. Waktu pengumpulan maksimal Senin, 19 Juni 2023.
3. Masih ada pegawai yang belum memahami sepenuhnya mengenai benturan kepentingan, sehingga dalam identifikasi potensi benturan kepentingan masih ditemukan kesalahan dalam pengklasifikasian jenis benturan.



DOKUMENTASI SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN



LAMPIRAN 2

FORM BENTURAN KEPENTINGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

No	Bidang/UPT/CDK	Jenis Benturan*	Detail Benturan Kepentingan	Penyebab	Upaya Pencegahan
1	Bid. Perikanan Tangkap (SDI dan PPI KaPi)	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan gerai perizinan di lapangan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	1. Ketidakpahaman terkait peraturan gratifikasi 2. Perilaku pengurus/pemilik kapal yang ingin segera selesai dokumen perijinan	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
2	Bid. Perikanan Tangkap (Kepelabuhanan dan Kenelayanan)	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP

3	Bid. Usaha dan Pengembangan Komoditas	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	Ketidakpahaman terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
4	Bid. Usaha dan Pengembangan Komoditas	Hubungan Afiliasi	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur
5	Bid. KP3K	Gratifikasi	rencana pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan KKPR	pelaku usaha yang ingin mendapatkan fasilitas kemudahan dalam proses KKPR	setiap permohonan informasi kesesuaian ruang laut dilakukan melalui surat/online sehingga mengurangi intensitas tatap muka dengan pelaku usaha
6	Bid. KP3K	hubungan afiliasi	pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur
7	Bid. KP3K	hubungan afiliasi	pemberian data/informasi rencana zonasi dalam bentuk peta shp	hubungan pertemanan	data/informasi dalam bentuk peta shp diberikan berdasarkan surat permohonan dan dilengkapi dengan tanda terima

8	Bid. KP3K	gratifikasi	pemberian data/informasi rencana zonasi dalam bentuk peta shp	pelaku usaha yang ingin mendapatkan fasilitas kemudahan dalam proses KKPR	setiap permohonan informasi kesesuaian ruang laut dilakukan melalui surat/online sehingga mengurangi intensitas tatap muka dengan pelaku usaha
9	Bid. KP3K	Gratifikasi	Pemilihan rekanan dlm pengadaan hibah barang/jasa	rekanan yang menginginkan salah satu proyek hibah barang/jasa	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur
10	Bid. KP3K	Gratifikasi	penentuan kelompok penerima hibah	kelompok petambak Garam yg melakukan gratifikasi agar mendapatkan bantuan	dilakukan verifikasi kelompok yg mengajukan proposal bantuan hibah bersama dg Dinas kabupaten terkait
11	Bid. KP3K	Hubungan Afiliasi	penentuan kelompok penerima hibah	prioritas kelompok penerima hibah	dilakukan verifikasi anggota kelompok apakah ada yg berkerja sbg perangkat desa/pegawai negeri
12	Bid. Pengawasan SDKP	Gratifikasi	kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha KP	"damai" agar kasus tidak berproses lebih lanjut	Prosedur pengawasan yang akuntabel dan analisis hasil / laporan hasil pengawasasn oleh tim / atasan pengawas perikanan

13	CDK Wilayah Barat	Hubungan afiliasi	hubungan pertemanan	adanya hubungan afiliasi atau kedekatan objektif dengan pemilihan penyedia	Melakukan pengadaan melalui SPSE agar transparan
14	CDK Wilayah Barat	Gratifikasi	hubungan pertemanan	pelaku usaha ingin mendapat kemudahan dalam pengajuan perijinan berusaha	Menerima berkas perijinan melalui OSS
15	CDK Wilayah Barat	Gratifikasi	kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha KP	"damai" agar kasus tidak berproses lebih lanjut	Prosedur pengawasan yang akuntabel dan analisis hasil / laporan hasil pengawasannya oleh tim / atasan pengawas perikanan
16	CDK Wilayah Selatan	Gratifikasi	kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha KP	"damai" agar kasus tidak berproses lebih lanjut	Prosedur pengawasan yang akuntabel dan analisis hasil / laporan hasil pengawasannya oleh tim / atasan pengawas perikanan
17	CDK Wilayah Selatan	Hubungan afiliasi	hubungan pertemanan	adanya hubungan afiliasi atau kedekatan objektif dengan pemilihan penyedia	Melakukan pengadaan melalui SPSE agar transparan

18	CDK Wilayah Selatan	Gratifikasi	hubungan pertemanan	pelaku usaha ingin mendapat kemudahan dalam pengajuan perijinan berusaha	Menerima berkas perijinan melalui OSS
19	CDK Wilayah Timur	Gratifikasi	kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha KP	pelaku usaha perikanan memberikan gratifikasi kepada pengawas perikanan saat melakukan pengawasan di lapangan	pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan analisa berdasarkan hasil di lapangan
20	CDK Wilayah Timur	Hubungan afiliasi	hubungan pertemanan	adanya hubungan afiliasi atau kedekatan objektif dengan pemilihan penyedia	Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
21	CDK Wilayah Timur	Gratifikasi	hubungan pertemanan	pelaku usaha ingin perizinan berusaha yang diajukan segera terbit	Seluruh proses pengajuan dan verifikasi perizinan berusaha dilakukan melalui aplikasi OSS RBA

22	BBIAPL	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan harapan terbangunnya hubungan baik.	ketidapahaman terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan, 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum, 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi.
23	BLPKIL	Hubungan Afiliasi	Barang / Jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi pengusulan	Ketersediaan barang / jasa di penyedia belum tersedia atau harus inden	spesifikasi barang / jasa harus dilakukan secara profesional sesuai prosedur dan diverifikasi oleh pengguna barang / jasa serta dipastikan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan
24	BLPKIL	Kelemahan Sistem Organisasi	Penerbitan Lembar Hasil Uji melebihi batas waktu sehingga terus menerus ditanyakan oleh pelanggan	Banyaknya jumlah sampel yang masuk sehingga proses pengujian menumpuk	Meningkatkan kepatuhan petugas laboratorium terhadap SOP Pengujian Sampel

25	BLPKIL	Kelemahan Sistem Organisasi	Limbah Laboratorium BLPKIL belum ditangani dengan baik	Belum adanya Instalasi Penanganan Limbah Laboratorium	Menyimpan Limbah Laboratorium dalam wadah tertentu, serta tidak membuang limbah sembarangan
26	BPMHP Kelas A	Hubungan Afiliasi	Barang / Jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi pengusulan	keakraban dg penyedia barang dan jasa	spesifikasi barang / jasa harus diverifikasi oleh pengguna barang / jasa serta dilakukan audit internal secara berkala
27	BPMHP Kelas A	Hubungan Afiliasi	Merubah hasil uji yang terdapat Laporan hasil pengujian (CAT)	keakraban dg pelanggan	Laporan hasil pengujian (CAT) diverifikasi oleh penyelia dan penanggung jawab teknis pengujian disebelum ditandatangani Kepala BPMHP
28	BPMHP Kelas A	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan kegiatan pembinaan pra-SKP dan sertifikasi SPPT SNI oleh pelaku usaha dengan harapan hasil pembinaan/sertifikasi dianggap sesuai/memenuhi	Keakraban pelaku usaha dengan personel yang melakukan kegiatan	Melakukan pergantian/rotasi personel agar tidak melakukan kegiatan secara berturut-turut pada pelaku usaha yang sama
29	PPP Morodemak	Perangkapan Jabatan	Kepala Pelabuhan tidak setiap saat ada di kantor, sehingga koordinasi terbatas	Kekosongan jabatan, sehingga Plt Kalabuh merangkap dengan Kepala di UPT lainnya	Segera mengusulkan untuk melantik pejabat definitif

30	PPP Morodemak	Gratifikasi	Membantu edukasi dan fasilitasi dalam pengurusan dokumen perizinan kapal perikanan	SDM nelayan yang masih rendah	Selalu melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan terkait integritas dan pengawasan internal setiap bulan
31	PPP Morodemak	Hubungan Afiliasi	Pemanfaatan dan pengelolaan aset belum optimal dilakukan	Identifikasi detail fisik aset belum dilakukan	Menindaklanjuti dokumen P3D agar aplikatif di lapangan, Identifikasi bersama dengan Kabupaten Demak
32	PPP Morodemak	Kepentingan Pribadi	Bekerja dari rumah atau di kantor	Kondisi rob, motor rusak	Memberikan semangat kepada seluruh pegawai dan upaya untuk memperbaiki infrastruktur
33	PPP Morodemak	Gratifikasi	Sewa Lahan, Kios, Brak dan Los	Akrab dengan penyewa maupun calon penyewa	Menerapkan Surat Perjanjian Sewa yang sudah disepakati (PKS)
34	PPP Morodemak	Hubungan Afiliasi	Pemahaman tentang pentingnya pengembangan pelabuhan dari sisi penanganan sampah	Pemahaman tentang sampah yang sangat kurang	Mengajak seluruh stakeholder peduli dan tahu pentingnya penanganan sampah di pelabuhan
35	PPP Morodemak	Kelemahan Sistem Organisasi	Kemampuan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai menghandel wilayah kerja	UPT PPP belum dilengkapi dengan sarana prasarana mobilitas di wilayah perairannya	Memenuhi sarpras mobilitas di perairan untuk mampu mengkover wilayah kerja

36	PPP Morodemak	Kelemahan Sistem Organisasi	Pemahaman terhadap kondisi tempat kerja yang berada pada daerah rob	anggapan yang sama terhadap kebutuhan lingkungan kerja antara daerah non rob dan daerah rob	Membedakan kebutuhan lingkungan kerja pada daerah rob dengan daerah normal
37	PPP Tasikagung	Gratifikasi	Pelaku usaha menginginkan pelayanan yang lebih cepat tanpa melalui prosedur yang berlaku	Integritas pegawai rendah	1. Melakukan pembinaan secara rutin 2. Melakukan roling petugas setiap periode tertentu
38	PPP Tasikagung	hubungan afiliasi	pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur
39	PPP Tasikagung	Gratifikasi	Penyedia jasa menginginkan mendapatkan proyek penyediaan barang/jasa	Integritas pegawai rendah	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur
40	PPP Asemdayong	Hubungan Afiliasi	Penertiban pengguna BMD belum optimal	Keberadaan pengguna BMD sejak sebelum adanya PPP Asemdayong	Pemberitahuan lewat surat teguran, tagihan dan peringatan secara periodik
41	PPP Asemdayong	Kelemahan Sistem Organisasi	Kebersihan kawasan masih rendah	Tenaga kebersihan hanya 1 orang	Kerja bakti bersih bersih kawasan semua pegawai setiap hari Jum'at

42	PPP Asemdayong	Kelemahan Sitem Organisasi	Pelayanan kapal bongkar belum tertib	Tidak memiliki pegawai yang berkompeten dalam menangani Tambat Labuh kapal	Kesepakatan pembagian areal dermaga bongkar dan labuh.
43	PPP Asemdayong	Hubungan Afiliasi	kepemilikan lahan kud di kawasan pelabuhan	Kepemilikan lahan dalam kawasan pelabuhan olrh kud yang memiliki sertifikat hgb	koordinasi dengan kepala dinas, BPN kab Pemalang
44	PPP Tawang	Gratifikasi	Percepatan dalam membuat dokumen perijinan	nelayan tidak mau mencoba mengurus sendiri dokumen perijinan, nelayan menyerahkan pembuatan dokumen perijinan kepada pihak ketiga atau ppp	sosialisasi dokumen perijinan, fasilitasi pembuatan dokumen perijinan, penguatan nilai nilai integritas petugas perijinan ppp
45	PPP Larangan	Hubungan Afiliasi	Penertiban penerapan portal milik BUMDES di wilayah PPP Larangan	Tidak maksimalnya pemasukan PAD Pas Masuk di PPP Larangan	Pembuatan Gerbang Masuk dan Portal PPP Larangan

				BUMDES Munjungagung yang menarik tiket masuk pengunjung di wilayah kerja PPP Larangan	Terus melakukan komunikasi terhadap BUMDes Munjungagung bahwa yang berhak menarik tiket masuk adalah PPP Larangan
46	PPP Larangan	Gratifikasi	Keterbatasan SDM Pelaku Usaha sehingga pada pelaksanaannya mengandalkan bantuan staf kantor	SDM Pelaku usaha rendah	Sering diadakan coffee morning untuk pelaku usaha
				Integritas SDM kantor tidak sesuai standar	Melakukan pembinaan secara rutin
47	PPP Larangan	Hubungan Afiliasi	penyedia sarana dan prasana aplikasi Gratis Ongkir	hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur
48	PPP TEGALSARI	Hubungan Afiliasi	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi atau RAB	Adanya hubungan pertemanan/nepotisme	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan
49	PPP TEGALSARI	Gratifikasi	Pengurusan dokumen perijinan kapal perikanan	Perilaku pengurus/pemilik kapal yang ingin segera selesai dokumen perijinan	Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang

50	PPP TEGALSARI	Kepentingan Pribadi	Memberikan alokasi sewa lahan/kios kepada orang tertentu tanpa mekanisme yang benar	Perilaku pelaku usaha di pelabuhan yang ingin mendapatkan lokasi strategis dengan mengiming-imingi personil	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
51	PPP Klidang Lor	Kelemahan sistem organisasi	asset bangunan milik bea cukai cabang tegal yang selama ini tidak pernah digunakan sehingga bangunan menjadi mangkrak, maka lahan tersebut akan digunakan oleh PPP Klidang Lor untuk gedung serba guna karena lahan/tanah tersebut milik PPP Klidang Lor.	Asset bangunan gedung yang dimiliki Bea Cukai diatas tanah milik PPP Klidang Lor	Sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai Tegal, saat ini masih menunggu konfirmasi dari Bea Cukai Tegal
52	PPP Klidang Lor	Perangkap Jabatan	permohonan pelayanan perizinan sedikit tertunda	Syahbandar merangkap jabatan sebagai Syahbandar Wonokerto dan Klidang Lor	petugas syahbandar supaya mengatur waktunya sehingga pelayanan perizinan tidak terganggu
53	PPP Lohgending	Gratifikasi	Pelaku usaha (sewa lahan) menginginkan pelayanan cepat akan tetapi persyaratan dokumen tidak lengkap (tanpa melalui prosedur ketentuan yang berlaku)	Integritas pegawai rendah	Pembinaan secara rutin kepada pegawai secara intern, bila diperlukan dilakukan rolling staf secara berkala

54	PPP Lohgending	Gratifikasi	Pengurusan dokumen perizinan oleh pengurus / pemilik kapal	integritas pegawai rendah	Pembinaan pegawai secara rutin
55	PPP Bajomulyo	Gratifikasi	Upaya pemberian gratifikasi kepada staf PPP pada pengurusan dokumen perijinan dan pelayanan kepelabuhanan lainnya oleh pengurus/pemilik kapal	Adanya beberapa ketentuan/persyaratan yang belum dapat dipenuhi, namun tetap ingin diproses permohonannya	Sosialisasi, rapat internal, serta himbauan kepada pengurus/pemilik kapal
56	PPP KARIMUNJAWA	Kepentingan Pribadi	Penyewa lahan sering memperjual belikan lahan/tempat yang ditempati	Lahan adalah bekas tambak dan TPI yang sdh tidak berfungsi, Jauh dari Pengawasan, arealnya luas tersebar di 6 lokasi.	Memperingatkan kepada pengguna lahan untuk mentaati Akta Perjanjian Sewa Lahan kepada pengguna lahan.
57	PPP KARIMUNJAWA	Kepentingan Pribadi	Warga meminta perbaikan jalan/sarpras	Merasa sudah membayar sewa	Menyampaikan aspirasi ke dinas
58	PPP Wonokerto	Hubungan Afiliasi	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur
59	PPP Wonokerto	Gratifikasi	Pengurusan dokumen perijinan kapal perikanan	Perilaku individu atau personil yang tamak / rakus serta moral yang lemah	Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang

60	PPP Wonokerto	Kepentingan Pribadi	Memberikan alokasi sewa lahan/kios kepada orang tertentu tanpa mekanisme yang benar	Perilaku individu atau personil yang tamak / rakus serta moral yang lemah	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan
					Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang

